



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



Jadi Tuan Rumah Garuda AI Impact Summit, Perkuat Pemerintahan Digital

KOTA-Kabupaten Sidoarjo terpilih sebagai tuan rumah Garuda AI Impact Summit 2026 Regional Sidoarjo, sebuah forum kolaborasi antara Garuda AI, Binar, Microsoft, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), serta Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

Sebanyak 150 aparat sipil negara (ASN) pengelola media sosial organisasi

perangkat daerah (OPD) dan 50 pelaku UMKM mengikuti kegiatan yang digelar di Pendopo Delta Wibawa Sidoarjo, Selasa pagi (21/4). Acara dibuka oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Sidoarjo, Ainun Amalia.

Empat narasumber dihadirkan dalam forum tersebut, yakni AI Skills Director

● Ke Halaman 10

TEKNOLOGI: Kegiatan Garuda AI Impact Summit 2026 Regional Sidoarjo.



Jadi Tuan Rumah...

Microsoft Indonesia Arief Suseno, pegiat UMKM dan AI Jawa Timur Abdul Mughits, Widyaiswara Kementerian Komunikasi dan Digital RI Yuliar M. Zega, serta CEO Dapoer Digital Kreatif Sinar Hadi Wijaya.

Ainun Amalia mengatakan, Garuda AI Impact Summit 2026 menjadi langkah strategis dalam mendorong akselerasi teknologi di daerah. Menurutnya, Artificial Intelligence (AI) saat ini bukan lagi sekadar tren, tetapi sudah menjadi instrumen penting untuk meningkatkan daya saing daerah dan kualitas hidup masyarakat.

"Hari ini, Sidoarjo tidak hanya men-

jadi saksi, tetapi juga menjadi kontributor utama dalam agenda strategis nasional melalui Garuda AI Impact Summit 2026," ujarnya.

Ia menegaskan, implementasi pemerintahan digital di Kabupaten Sidoarjo bukan sekadar wacana. Pemkab Sidoarjo, kata dia, telah membangun fondasi ekosistem digital yang kokoh dan inklusif sebagai bentuk nyata transformasi daerah.

"Kehadiran AI harus kita pandang sebagai pengungkit yang akan memperkuat tiga pilar utama pembangunan kita," katanya.

Tiga pilar tersebut meliputi akselerasi tata kelola pemerintahan (smart governance), transformasi komunikasi

publik yang responsif, serta inklusivitas ekonomi digital bagi UMKM.

Menurut Ainun, integrasi AI dalam sistem pemerintahan daerah diarahkan untuk menyederhanakan birokrasi dan mempercepat pengambilan keputusan berbasis data (data-driven policy).

"Kita ingin menciptakan birokrasi yang lebih ramping, namun lebih cerdas dalam melayani," tegasnya.

Ia juga menyampaikan bahwa seluruh ASN di Sidoarjo harus mampu menjadi garda terdepan dalam penyebaran informasi yang cepat, akurat, dan adaptif. Dalam hal itu, AI dinilai dapat menjadi mitra strategis untuk mendeteksi isu sejak dini serta menyusun narasi publik yang lebih tepat sasaran.

"AI hadir sebagai mitra strategis untuk mendeteksi isu secara dini dan menyusun narasi publik yang lebih tepat sasaran," ungkapnya.

Selain itu, Pemkab Sidoarjo juga berkomitmen memastikan teknologi digital dapat dimanfaatkan para pelaku UMKM. Teknologi tidak hanya dinikmati perusahaan besar, tetapi juga menjadi alat produksi bagi UMKM agar naik kelas dan mampu bersaing di pasar global.

"Ini adalah peluang emas bagi 150 ASN dan 50 pelaku UMKM terpilih untuk mendapatkan keterampilan aplikatif melalui sesi materi dan diskusi. Jadikan forum kolaboratif lintas sektor ini sebagai ruang belajar, berinovasi,

dan menciptakan dampak nyata bagi kemajuan Kabupaten Sidoarjo," pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo Sidoarjo Eri Sudewo mengatakan, penyelenggaraan Regional AI Summit kali ini memiliki beberapa sasaran utama. Salah satunya menghasilkan Peta Jalan Komitmen AI Lokal (Local AI Commitment Roadmap) yang disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi daerah Sidoarjo.

"Hasil peta jalan lokal ini nantinya akan dikonsolidasikan ke dalam Buku Kebijakan AI (AI Policy White Paper) yang akan diluncurkan pada puncak acara National AI Summit mendatang," ujarnya. (dik/vga)



HEARING DPRD SIDOARJO: 'Keruwetan' Perumahan MPS, Kaji Reza Minta Developer Stop Pemasaran dan Urus Izin

"Dari rangkaian peristiwa dan bukti-bukti, bahwa apa yang dilakukan pengembang perumahan MPS itu adalah penipuan dan penggelapan," kata Supriyono SH, anggota Komisi B DPRD Sidoarjo.

Apr 21, 2026 - 17:13



Giat hearing DPRD Sidoarjo membedah keruwetan perumahan MPS di Desa Mojoruntut, Kec. Krembung.

NUSADAILY – SIDOARJO: Lagi-lagi keruwetan perumahan mewarnai Sidoarjo. Kali ini terjadi di Perumahan Mapan Putra Sentosa (MPS) di Desa Mojoruntut, Kecamatan Krembung, Kab. Sidoarjo. Sekitar 150 penghuni yang menjadi korban pengembang (developer) nakal 'wadhu' ke DPRD Kabupaten Sidoarjo.

Menindaklanjuti permasalahan ini DPRD Sidoarjo menggelar hearing di ruang sidang paripurna, pada Selasa (21/4/2026) sore. Giat dengar pendapat dipimpin Ketua Komisi A H. Rizza Ali Faizin dengan didampingi Ketua Komisi B Bambang Pujianto, dan Ketua Komisi C Choirul Hidayat, dengan diikuti tim warga perumahan (MPS), perwakilan developer.

Juga hadir pejabat OPD terkait, termasuk Ridho Prasetyo, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Kabupaten Sidoarjo. "Untuk menyelesaikan permasalahan ini, kami sudah melapor ke Polresta Sidoarjo. Melalui forum dengar pendapat ini, tentunya kami berharap pihak DPRD bisa membantu menyelesaikannya," ujar Radi Nugroho, Koordinator tim perwakilan warga perumahan MPS.

Diungkapkan, kawasan perumahan itu dihuni sejak 2018. Sekarang jumlah penghuni mencapai 151 kepala keluarga (KK). Dari jumlah itu sekitar 30 KK sudah membayar lunas sejak 2022, namun sampai sekarang belum mendapat sertifikat sebagai haknya dari pihak pengembang PT MPS.

"Jadi sudah hampir 4 tahun kami menuntut hak atas sertifikat itu, tapi sampai sekarang pihak pengembang belum memenuhinya. Kami benar-benar ditipu oleh pengembang," katanya. "Yang kami sesalkan, pihak pengembang masih terus memasarkan sehingga jumlah korban terus bertambah," ujar Radi, menambahkan.

Dalam hearing juga terungkap PT MPS tidak bisa memenuhinya kewajibannya memberikan sertifikat kepada user yang sudah lunas, karena tidak mengantongi perizinan sama sekali. Sejauh ini untuk membangun kawasan perumahan itu, pihak pengembang hanya bermodal membebaskan 37 ancer lahan berstatus gogol gilir. Namun itu tidak diikuti dengan pengurusan alih status kepemilikan dari gogol gilir menjadi tetap untuk selanjutnya dialihkan status kepemilikannya ke pengembang, menyusul terjadinya jual beli tersebut.



Giat hearing DPRD Sidoarjo membedah keruwetan perumahan MPS di Desa Mojaruntut, Kec. Krembung.

NUSADAILY – SIDOARJO: Lagi-lagi keruwetan perumahan mewarnai Sidoarjo. Kali ini terjadi di Perumahan Mapan Putra Sentosa (MPS) di Desa Mojaruntut, Kecamatan Krembung, Kab. Sidoarjo. Sekitar 150 penghuni yang menjadi korban pengembang (developer) nakal ‘wadhul’ ke DPRD Kabupaten Sidoarjo.

Menindaklanjuti permasalahan ini DPRD Sidoarjo menggelar hearing di ruang sidang paripurna, pada Selasa (21/4/2026) sore. Giat dengar pendapat dipimpin Ketua Komisi A H. Rizza Ali Faizin dengan didampingi Ketua Komisi B Bambang Pujianto, dan Ketua Komisi C Choirul Hidayat, dengan diikuti tim warga perumahan (MPS), perwakilan developer.

Juga hadir pejabat OPD terkait, termasuk Ridho Prasetyo, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sidoarjo. “Untuk menyelesaikan permasalahan ini, kami sudah melapor ke Polresta Sidoarjo. Melalui forum dengar pendapat ini, tentunya kami berharap pihak DPRD bisa membantu menyelesaikannya,” ujar Radi Nugroho, Koordinator tim perwakilan warga perumahan MPS.

Diungkapkan, kawasan perumahan itu dihuni sejak 2018. Sekarang jumlah penghuni mencapai 151 kepala keluarga (KK). Dari jumlah itu sekitar 30 KK sudah membayar lunas sejak 2022, namun sampai sekarang belum mendapat sertifikat sebagai haknya dari pihak pengembang PT MPS.

“Jadi sudah hampir 4 tahun kami menuntut hak atas sertifikat itu, tapi sampai sekarang pihak pengembang belum memenuhinya. Kami benar-benar ditipu oleh pengembang,” katanya. “Yang kami sesalkan, pihak pengembang masih terus memasarkan sehingga jumlah korban terus bertambah,” ujar Radi, menambahkan.

Dalam hearing juga terungkap PT MPS tidak bisa memenuhi kewajibannya memberikan sertifikat kepada user yang sudah lunas, karena tidak mengantongi perizinan sama sekali. Sejauh ini untuk membangun kawasan perumahan itu, pihak pengembang hanya bermodal membebaskan 37 ancer lahan berstatus gogol gilir. Namun itu tidak diikuti dengan pengurusan alih status kepemilikan dari gogol gilir menjadi tetap untuk selanjutnya dialihkan status kepemilikannya ke pengembang, menyusul terjadinya jual beli tersebut.

Selain itu, pihak pengembang sama sekali tidak mengurus dokumen legalitas terkait perizinan dalam pengelolaan kawasan perumahan tersebut. “Dari rangkaian peristiwa yang terjadi itu, jelas-jelas apa yang dilakukan pengembangan adalah penipuan dan penggelapan. Warga perumahan bisa menyelesaikan melalui proses hukum pidana maupun perdata,” kata Supriyono SH, anggota Komisi B yang ikut dalam hearing tersebut.

Sementara itu, Kaji Reza, sapaan Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo bisa memahami keresahan warga perumahan MPS. Pihaknya meminta pihak pengembang secepatnya menyelesaikan kewajibannya. “Dalam hearing ini, semestinya direktornya yang datang. Ini yang saya sesalkan, tapi tidak apa-apa melalui perwakilannya, kami meminta kewajiban-kewajiban sebagai pengembang segera dipenuhi,” tegasnya.

Dikatakan, semestinya pihak pengembang tidak boleh memperjualbelikan unitnya kepada masyarakat, sebelum mengantongi kelengkapan perizinan atas usaha pengembangan perumahan tersebut. “Jadi mulai sekarang, kami minta pengembang menghentikan jual beli unitnya agar korbannya tidak bertambah banyak. Urus dan selesaikan dulu perizinan, baru boleh melanjutkan pemasaran,” ujar Kaji Reza.

Lebih lanjut, politikus PKB ini menambahkan, pihaknya segera melakukan kunjungan ke lokasi. Selain itu terus memantau perkembangannya,--apakah ada titik baik dari pengembangan menyelesaikan permasalahan ini dengan segera mengurus kelengkapan izin, atau sebaliknya sehingga perlu dilakukan langkah tegas yang diformulasikan dengan Pemkab Sidoarjo.

“Ini tentunya menjadi pembelajaran bagi masyarakat. Sebelum membeli rumah atau tanah kaplingan di perumahan harus waspada dan teliti. Telusuri masalah status lahannya maupun perizinanannya. Itu bisa konfirmasi di pemerintahan desa, kantor kecamatan maupun OPD terkait agar tidak melahirkan permasalahan di kemudian hari,” tegas Kaji Reza. (*cak ful)

Tags:

#DPRD #DPRD Sidoarjo #hearing #perumahan MPS #Komisi DPRD #Rizza Ali Faizin #Pengembang Nakal #Izin perumahan





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

PRT Berhak atas Jaminan Kesehatan-Ketenagakerjaan

Disahkan DPR,
UU PPRT Juga Atur
Upah dan Perekrutan

JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) menjadi undang-undang dalam rapat paripurna kemarin (21/4). Regulasi tersebut menjadi tonggak perlindungan pekerja sektor domestik, tapi tantangan terbesar ada di pelaksanaan di lapangan.

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Bob Hasan menyampaikan bahwa RUU PPRT merupakan usul DPR yang telah disusun sejak 2025 dan disetujui menjadi usul DPR pada 12 Maret lalu. Dia menjelaskan, dalam proses penyusunan, Baleg telah melibatkan berbagai pihak. Mulai dari pakar, lembaga swadaya masyarakat, aktivis buruh, akademisi, hingga instansi pemerintah.

Sebanyak 32 pihak turut memberikan masukan melalui rapat dengar pendapat dan kunjungan kerja. Setelah menerima daftar inventarisasi masalah, Baleg membentuk panitia kerja (panja) yang melakukan pembahasan secara intensif hingga menghasilkan rumusan akhir.

Hasan memaparkan sejumlah substansi penting dalam undang-



TONGGAK PERLINDUNGAN: Menteri Hukum Supratman Andi Agtas (kiri) menyerahkan berkas pandangan pemerintah tentang RUU PPRT kepada Ketua DPR Puan Maharani (dua dari kanan) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin (21/4).

undang tersebut. Di antaranya, perlindungan pekerja rumah tangga berasaskan penghormatan hak asasi manusia, keadilan, kesejahteraan, dan kepastian hukum.

Selain itu, PRT berhak memperoleh jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan. Perekrutan juga dapat dilakukan secara langsung maupun melalui perusahaan penempatan yang berbadan hukum dan berizin. "P3RT (Perusahaan Penempatan Pekerja Rumah Tangga, Red) dilarang memotong upah atau memungut biaya dalam bentuk apa pun dari calon PRT

maupun PRT," ucapnya.

UU ini juga mengatur pendidikan dan pelatihan vokasi bagi calon PRT, termasuk pemahaman norma sosial dan budaya di lingkungan kerja. Pengawasan pelaksanaan undang-undang dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah.

"Peraturan pelaksanaan paling lambat ditetapkan satu tahun sejak undang-undang ini berlaku," ujarnya.

Menurut Hasan, pengesahan ini sebagai kado terindah di Hari Kartini yang diharapkan menjadi pelita perlindungan bagi pekerja rumah tangga.

Cegah Diskriminasi hingga Pelecehan

Sementara itu, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas yang mewakili Presiden Prabowo Subianto menyatakan, regulasi tersebut bertujuan memberikan kepastian hukum, mencegah diskriminasi dan eksploitasi, serta menciptakan hubungan kerja yang harmonis antara pekerja dan pemberi kerja.

"Pembentukan undang-undang ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada pekerja rumah tangga maupun pemberi kerja, serta mencegah segala bentuk diskriminasi, eksploitasi,

dan pelecehan," ucapnya.

Anggota Komisi XIII DPR Mafirion menyebut, undang-undang itu mengubah hubungan kerja PRT yang selama ini bersifat informal menjadi lebih profesional dan berbasis hukum. Namun demikian, Mafirion mengingatkan bahwa tantangan terbesar terletak pada implementasi di lapangan mengingat hubungan kerja pekerja rumah tangga berada di ranah privat.

"Harus ada terobosan agar perlindungan ini benar-benar dirasakan hingga ke tingkat rumah tangga," ucapnya. (lyn/mia/ttg)

Jawa Pos

Beasiswa Indonesia Bangkit Kembali Dibuka

JAKARTA - Kementerian Agama (Kemenag) kembali membuka kesempatan kuliah gratis lewat Beasiswa Indonesia Bangkit (BIB). Beasiswa ini diselenggarakan Kemenag bersama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Pendaftaran saat ini sedang dibuka hingga 31 Mei mendatang.

Kepala Pusat Pembiayaan Pendidikan Agama dan Keagamaan (Puspenma) Kemenag Ruchman Basori, mengatakan secara teknis maupun jenis beasiswa tidak ada perubahan signifikan dibanding periode sebelumnya. "Tetapi, ada beberapa catatan yang perlu saya sampaikan," katanya, Senin (20/4).

Ruchman mengatakan di antara perubahan terjadi pada syarat pelamar kategori keluarga besar Kemenag. Sebelumnya, ikatan keluarga besar Kemenag ha-

JADWAL BEASISWA INDONESIA BANGKIT (BIB) 2026 KEMENAG

- Pendaftaran: 1 April–31 Mei
- Seleksi Administrasi: 1–15 Juni
- Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi: 16 Juni
- Masa Sanggah: 16–17 Juni
- Pengumuman Hasil Masa Sanggah: 22 Juni
- Seleksi Asesmen Kapasitas Akademik dan Psikologis: 25–29 Juni
- Pengumuman Hasil Seleksi Asesmen Kapasitas Akademik dan Psikologis: 1 Juli
- Seleksi Wawancara: 3–20 Juli
- Pengumuman Kelulusan: 27 Juli

Sumber: Kementerian Agama
GRAFIS: ADIT/JAWA POS

nya berlaku untuk satu tingkatan di bawahnya.

Misalnya, bagi pelamar beasiswa S2 kategori keluarga besar Kemenag sebelumnya harus tamatan S1 di perguruan tinggi di bawah naungan Ke-



HILMI SETIAWAN/JAWA POS
Ruchman Basori

menag atau dari jurusan keagamaan di pendidikan umum.

Untuk tahun ini, ketentuan keluarga besar Kemenag diperlonggar, yaitu boleh melompat satu tingkat ke belakang. Artinya, pelamar BIB 2026 untuk S2 boleh lulusan S1 kampus umum dengan syarat tercatat sebagai lulusan Madrasah Aliyah (MA), negeri maupun swasta. "Syarat baru ini untuk mewadahi anak-anak lulusan MA yang S1 di kampus umum supaya tetap bisa ikut BIB," tandasnya.

Begitu pula bagi yang mau melamar BIB kategori S1, tidak harus alumni dari MA. Namun, jenjang sebelumnya harus lulusan Madrasah Tsanawiyah (MTs), negeri maupun swasta. Ruchman mengatakan informasi detail terkait jadwal, persyaratan, sampai kampus tujuan dapat dilihat langsung di portal beasiswa Kemenag atau LPDP. Menariknya, meskipun di bawah naungan Kemenag, pelamar boleh memilih jurusan umum seperti teknik di kampus di bawah Kemendiknasaintek.

Dia menegaskan pelamar harus memperhatikan syarat yang ditetapkan, misalnya terkait skor IPK minimal. Ruchman mengatakan skor IPK menjadi rujukan untuk melihat ketahanan akademik seseorang. "Karena menempuh studi lanjut itu penuh tantangan. Tidak boleh pantang menyerah," tandasnya. (wan/ali)



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

INFRASTRUKTUR



ANGGER BONDAN/JAWA POS

PENGURUKAN: Jalan Bohar yang rusak diperbaiki kemarin (21/4).

Perbaikan Jalan Bohar Ditarget Rampung Sepekan

SIDOARJO - Usai disidak Wabup Sidoarjo Mimik Idayana, Jalan Bohar di Kecamatan Taman yang rusak berat akhirnya diperbaiki. Pemkab menargetkan perbaikan rampung dalam waktu sepekan.

Kondisi Jalan Bohar yang menjadi jalur alternatif penghubung Gedangan menuju Taman dan Waru dikeluhkan sejak Januari. Itu karena jalan berlubang dan sering digenangi air. Penyebabnya, jalan berpaving tersebut kerap dilalui kendaraan bertonase besar sehingga mempercepat kerusakan.

"Jalannya sudah lama rusak karena dilewati kendaraan besar dan sering macet. Terutama pagi dan sore," ujar Dimas, salah satu warga sekitar. Kerusakan semakin intens karena air sungai yang meluap.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (DPUBMSDA) Sidoarjo M. Makmud mengatakan, Jalan Bohar masuk dalam ruas Suko-Masangan Wetan yang menjadi prioritas pemeliharaan bulan ini. Pengerjaan perbaikan dimulai kemarin (21/4). "Hari ini kami lakukan pengurukan dan akan dilakukan penambalan sebagai bagian dari pemeliharaan lima titik jalan," katanya. (eza/hen)

Jawa Pos

Pembongkaran Bangunan di Pasar yang Dipercaya sebagai Makam Picu Polemik

Polisi Selidiki Motif Perusakan

SIDOARJO – Pembongkaran makam tua di kawasan Pasar Sepanjang, Kelurahan Wonocolo, Taman, yang dipercaya warga milik ulama memicu polemik. Sebagian masyarakat mengkritik aksi perusakan makam yang dikenal sebagai pesarean Mbah Dirjo Joyo Ulomo tersebut.

Pembongkaran dilakukan Samsul Arifin yang mengaku sebagai penjaga pasar Jumat (16/4). Dia menyebut makam tersebut tidak berisi jenazah, melainkan benda lain. "Dari cerita bapak saya yang dikubur bukan jenazah. Namun, Al-Qur'an yang su-



ANGGER BONDAN/JAWA POS

dah tidak terbaca dan boneka lempung," katanya.

Menurut Samsul, keberadaan makam itu awalnya hanya digunakan untuk menakut-nakuti anak kecil

pada waktu itu. Karena itu, baginya praktik ziarah di makam tersebut tidak tepat.

Panit Reskrim Polsek Taman Iptu Andri Sasongko mengatakan, polisi mene-

rima pengaduan masyarakat (dumas) terkait pembongkaran makam yang dipercaya sebagai sesepuh Kelurahan Ngelom. Petugas telah mengecek langsung lokasi ke-

PRO-KONTRA: Samsul Arifin menunjukkan papan nama yang dicopot di bangunan yang diduga makam ulama di kawasan Pasar Sepanjang. Aksi itu membuat sebagian masyarakat marah.

jadian. "Kami sudah memeriksa beberapa orang. Terduga pelaku menyebut makam tidak asli," kata Andri.

Menurut dia, polisi juga menelusuri makam tersebut dari sejumlah tokoh masyarakat. Belum ada kejelasan asal-usul makam. "Kami masih menunggu laporan resmi untuk proses lebih lanjut," katanya.

Lurah Ngelom Akbar Prayoga mengatakan, dalam waktu dekat, pihaknya akan menggelar pertemuan bersama kecamatan, Kelurahan Wonocolo, tokoh agama, dan para sesepuh Desa Ngelom. Hal tersebut untuk menyikapi polemik pembongkaran makam yang menjadi polemik di masyarakat. (eza/ful/hen)

Jawa Pos



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

19 Pendaftar Direksi BUMD Uji Kompetensi Hari Ini

Seleksi Pimpinan PT BPR Delta Artha dan PT Aneka Usaha

SIDOARJO - Panitia Seleksi (pansel) calon komisaris dan direksi PT BPR Delta Artha serta PT Aneka Usaha Sidoarjo telah merampungkan verifikasi administrasi. Sebanyak 19 pendaftar dinyatakan lolos

TAHAPAN SELEKSI CALON KOMISARIS DAN DIREKTUR	
Pendaftaran	13-17 April
Pengumuman lolos administrasi	21 April
Ujian pra kompetensi	23 April
Uji kelayakan dan kepatutan	28 April
Wawancara akhir	6-8 Mei

Sumber: Berbagai Informasi

dan berhak mengikuti uji pra kompetensi yang digelar besok (23/4).

Kabag Perekonomian Pemkab Sidoarjo Muhammad Nur mengatakan bahwa peserta yang lolos didominasi kalangan profesional. Jumlahnya mencapai 15 orang. Sedangkan, empat lainnya berasal dari Aparatur Sipil Negara (ASN). "Seluruhnya memenuhi persyaratan administrasi yang ditetapkan pansel," kata Muhammad Nur.

Seleksi untuk mengisi sejumlah posisi strategis. Di

antaranya komisaris independen, komisaris dari unsur pemerintah daerah serta direksi di PT BPR Delta Artha. Selain itu, juga ada posisi direktur di PT Aneka Usaha Sidoarjo.

Seleksi melibatkan pansel yang diketuai Sekretaris Daerah (Sekda) Sidoarjo Fenny Apri-dawati. Dia didampingi Kabag Perekonomian Muhammad Nur dan Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Bahrul Amig. Sementara un-

tuk unsur independen diisi akademisi Universitas Airlangga, Prof Nuri Herachwati.

Berdasarkan jadwal, tahapan berikutnya adalah uji pra kompetensi yang digelar besok (23/4). "Peserta yang lolos uji kompetensi akan melanjutkan ke uji kelayakan dan kepatutan (UKK)," kata Muhammad Nur. Tahapan tersebut meliputi tes tulis, psikotes, hingga presentasi makalah di depan Pansel. (ful/hen)

Jawa Pos



Wabup Mimik sidak jalan rusak di Desa Bohar Taman. foto Diskominfo.

Rusak Parah, Wabup Minta Jalan Desa Bohar Diaspal

Sidoarjo - HARIAN BANGSA

Wakil Bupati (Wabup) Mimik Idayana meminta Dinas PU BMSDA segera memperbaiki jalan rusak di Desa Bohar Kecamatan Taman.

Ia meminta jalan yang sebagian berupa paving itu nantinya diperbaiki dengan pengaspalan. "Jalan tersebut harus diaspal, bukan dibeton, agar menyam-

bung dengan ruas yang sudah ada," cetusnya saat sidak ke ruas jalan itu, Senin (20/4).

Kata Mimik, jika memungkinkan bulan ini segera dikerjakan karena kondisinya berbahaya serta dapat menimbulkan korban.

Ia juga menegaskan perbaikan jalan tersebut akan menggunakan anggaran APBD dan ditangani Dinas PU BMS-

DA, serta meminta agar Dinas PU segera menindaklanjuti karena kondisinya sudah sangat parah dan membahayakan.

Dijelaskannya, penggunaan paving pada jalan tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan intensitas lalu lintas yang ada, karena jalan itu kini sering dilalui berbagai macam kendaraan. (sta/rus)

Angkat Isu Global, Umsida Bikin International Class Laboratory

Sidoarjo - HARIAN BANGSA

Program Studi Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (UMSIDA) menyelenggarakan kegiatan International Class Laboratory pada 20 April 2026 pukul 13.00 WIB. Kegiatan ini dilaksanakan oleh tiga laboratorium, yakni Laboratorium e-Government, Laboratorium Kebijakan Publik dan Perencanaan Pembangunan, serta Laboratorium Kebijakan Publik dan Perencanaan Pembangunan, dengan menghadirkan narasumber internasional dari berbagai perguruan tinggi.

Pada Laboratorium e-Government, sesi bertajuk Digital Governance and Public Communication in the Information Society menghadirkan Dr. Kenneth Lee Tze Wui, M.Comm., Ph.D dari Universiti Tunku Abdul Rahman (UTAR), Malaysia. Ia membahas perkembangan digital governance di negaranya serta tantangan dalam membangun komunikasi publik yang transparan dan responsif.

Laboratorium Governance dan Manajemen Pelayanan Publik mengangkat tema Governance and Public Service Management for Improving Service Delivery dengan narasumber Zshyna Mae Ahmed, MPA dari Pangasinan State University, Filipina. Dalam paparannya, ia menyoroti isu kualitas pelayanan publik dan pentingnya inovasi berbasis kebutuhan masyarakat.

Pada sesi ketiga Laboratorium Kebijakan Publik dan Perencanaan Pembangunan menghadirkan Dr. Madlyn D. Tingco, DPA dari Pangasinan State University, Filipina, dengan topik Strategic Development Planning for Sustainable Communities. Ia mengulas tantangan perencanaan pembangunan berkelanjutan di tengah dinamika sosial dan lingkungan. (cat/rus)



Ketua Program Studi Administrasi Publik UMSIDA,
Ilmi Usrotin Choiriyah MAP.

Misi Jadi Kontributor Utomo Agenda Strategis Nasional

Sidoarjo, Memorandum

Sidoarjo terpilih sebagai tuan rumah Garuda AI Impact Summit 2026 tingkat regional, Selasa (21/4). Kegiatan tersebut merupakan kolaborasi antara Garuda AI, Binar, Microsoft, dan Kementerian Komdigi dengan Pemkab Sidoarjo.

Sejumlah 150 ASN admin medsos OPD Sidoarjo serta 50 pelaku UMKM diundang menjadi peserta dalam acara yang digelar di Pendopo Delta Wibawa Sidoarjo itu. Acara itu dibuka oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Sidoarjo Ainun Amalia.

Empat narasumber dihadirkan. Yakni, Arief Suseno yang menjabat sebagai AI Skills Director Microsoft Indonesia, Abdul Mughlis dari pegiat UMKM dan AI Jatim, Yuliar M Zega Widyaiswara dari Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), serta Sirnar Hadi Wijaya CEO Dapoer Digital Kreatif.

Dalam sambutannya, Ainun Amalia mengatakan, Garuda AI Impact Summit 2026 menjadi langkah strategis dalam akselerasi teknologi daerah. Disampaikan bahwa *artificial intelligence* (AI) bukan lagi sekadar tren teknologi. Melainkan instrumen vital untuk memperkuat daya saing daerah dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. "Hari ini, Sidoarjo tidak hanya menjadi saksi, tetapi menjadi kontributor utama dalam agenda strategis nasional melalui Garuda AI Impact Summit 2026," ujarnya. Ainun Amalia menyebutkan, implementasi pemerintah di-



Pembukaan Garuda AI Impact Summit 2026 Regional Sidoarjo oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Ainun Amalia.

gital di Sidoarjo bukan sekadar wacana. Pemkab bahkan telah membangun fondasi ekosistem

digital yang kokoh dan inklusif. Hal tersebut menjadi bentuk komitmen nyata transformasi

daerah yang dilakukan. "Kehadiran AI harus kita pandang sebagai pengungkit yang akan

memperkuat tiga pilar utama pembangunan kita," paparnya.

Tiga pilar utama pembangunan tersebut, ungkap Ainun Amalia, yakni akselerasi tata kelola pemerintahan (*smart governance*), transformasi komunikasi publik yang *responsive* serta inklusivitas ekonomi digital bagi UMKM.

Integrasi AI dalam sistem pemerintahan daerah ditujukan untuk menyederhanakan birokrasi dan mempercepat proses pengambilan keputusan berbasis data (*data-driven policy*). "Kita ingin menciptakan birokrasi yang lebih ramping namun lebih cerdas dalam melayani," urainya.

Ainun Amalia juga menyampaikan Kabupaten Sidoarjo terus mewujudkan transformasi komunikasi publik yang *responsive*. "Ini adalah peluang emas bagi 150 ASN dan 50 pelaku

UMKM terpilih untuk mendapatkan keterampilan *aplikatif* yang nyata melalui sesi penyampaian materi dan diskusi nanti. Jadikan forum kolaborasi lintas sektor ini sebagai ruang untuk belajar, berinovasi, dan menciptakan dampak nyata bagi kemajuan Kabupaten Sidoarjo," pungkasnya.

Kepala Dinas Kominfo Sidoarjo Eri Sudewo menambahkan, penyelenggaraan acara ini memiliki sasaran utama. Salah satunya, menghasilkan peta jalan komitmen AI lokal, disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi daerah. "Saya berharap penyelenggaraan Garuda AI Impact Summit 2026 Regional Sidoarjo ini akan membangun fondasi ekosistem digital yang inklusif untuk memperkuat tata kelola pemerintahan dan ekonomi digital bagi UMKM," sebutnya. (kri/jok/epe)



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



WATCH

Ekonomi Hukum Pemerintahan Politik

Polemik Perumahan MPS, DPRD Minta Pengembang Hentikan Pemasaran dan Segera Urus Perizinan

@wartanusa 21 April 2026



SIDOARJO – Permasalahan perumahan kembali mencuat di Kabupaten Sidoarjo. Kali ini, persoalan terjadi di Perumahan Mapan Putra Sentosa (MPS) yang berlokasi di Desa Mojaruntut, Kecamatan Krembung. Puluhan warga penghuni mengadukan nasib mereka ke DPRD Sidoarjo terkait dugaan belum terpenuhinya hak atas sertifikat rumah.

Menindaklanjuti aduan tersebut, DPRD Sidoarjo menggelar hearing (rapat dengar pendapat) di ruang sidang paripurna, Selasa (21/4/2026) sore. Rapat dipimpin Ketua Komisi A Rizza Ali Faizin, didampingi Ketua Komisi B Bambang Pujiyanto dan Ketua Komisi C Choirul Hidayat. Hadir pula perwakilan warga, pihak pengembang, serta sejumlah pejabat OPD terkait, termasuk Kepala DPMPTSP Sidoarjo, Ridho Prasetyo.

Koordinator perwakilan warga, Radi Nugroho, menyampaikan bahwa perumahan tersebut mulai dihuni sejak 2018 dan kini ditempati sekitar 151 kepala keluarga. Dari jumlah tersebut, sekitar 30 warga mengaku telah melunasi pembayaran sejak 2022, namun hingga kini belum menerima sertifikat hak milik.

"Kami sudah menunggu hampir empat tahun, tetapi sertifikat belum juga diberikan. Kami berharap DPRD bisa membantu penyelesaiannya," ujar Radi.

Ia juga menyebutkan bahwa pihak warga telah melaporkan persoalan tersebut ke Polresta Sidoarjo. Selain itu, warga menyangkan masih adanya aktivitas pemasaran unit oleh pengembang di tengah belum tuntasnya kewajiban kepada pembeli sebelumnya.

Dalam hearing tersebut juga terungkap bahwa perizinan perumahan diduga belum lengkap. Berdasarkan penjelasan yang disampaikan dalam forum, lahan yang digunakan disebut berasal dari status gogol gilir yang belum seluruhnya dialihkan secara administratif sesuai ketentuan yang berlaku.

Anggota Komisi B DPRD Sidoarjo, Supriyono, menyampaikan bahwa persoalan ini berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum, baik secara perdata maupun pidana, apabila ditemukan pelanggaran dalam proses pengembangannya. Namun demikian, ia menegaskan bahwa hal tersebut tetap perlu dibuktikan melalui mekanisme hukum yang berlaku.

Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo, Rizza Ali Faizin, menegaskan agar pihak pengembang segera menyelesaikan kewajibannya kepada konsumen. Ia juga menyangkan ketidakhadiran pimpinan perusahaan dalam forum tersebut.

"Kami meminta pengembang segera memenuhi kewajibannya kepada warga. Selain itu, untuk sementara waktu kami minta aktivitas pemasaran dihentikan sampai seluruh perizinan dan administrasi diselesaikan," tegasnya.



SIDOARJO – Permasalahan perumahan kembali mencuat di Kabupaten Sidoarjo. Kali ini, persoalan terjadi di Perumahan Mapan Putra Sentosa (MPS) yang berlokasi di Desa Mojoruntut, Kecamatan Krembung. Puluhan warga penghuni mengadukan nasib mereka ke DPRD Sidoarjo terkait dugaan belum terpenuhinya hak atas sertifikat rumah.

Menindaklanjuti aduan tersebut, DPRD Sidoarjo menggelar hearing (rapat dengar pendapat) di ruang sidang paripurna, Selasa (21/4/2026) sore. Rapat dipimpin Ketua Komisi A Rizza Ali Faizin, didampingi Ketua Komisi B Bambang Pujiyanto dan Ketua Komisi C Choirul Hidayat. Hadir pula perwakilan warga, pihak pengembang, serta sejumlah pejabat OPD terkait, termasuk Kepala DPMPTSP Sidoarjo, Ridho Prasetyo.

Koordinator perwakilan warga, Radi Nugroho, menyampaikan bahwa perumahan tersebut mulai dihuni sejak 2018 dan kini ditempati sekitar 151 kepala keluarga. Dari jumlah tersebut, sekitar 30 warga mengaku telah melunasi pembayaran sejak 2022, namun hingga kini belum menerima sertifikat hak milik.

“Kami sudah menunggu hampir empat tahun, tetapi sertifikat belum juga diberikan. Kami berharap DPRD bisa membantu penyelesaiannya,” ujar Radi.

Ia juga menyebutkan bahwa pihak warga telah melaporkan persoalan tersebut ke Polresta Sidoarjo. Selain itu, warga menyangkan masih adanya aktivitas pemasaran unit oleh pengembang di tengah belum tuntasnya kewajiban kepada pembeli sebelumnya.

Dalam hearing tersebut juga terungkap bahwa perizinan perumahan diduga belum lengkap. Berdasarkan penjelasan yang disampaikan dalam forum, lahan yang digunakan disebut berasal dari status gogol gilir yang belum seluruhnya dialihkan secara administratif sesuai ketentuan yang berlaku.

Anggota Komisi B DPRD Sidoarjo, Supriyono, menyampaikan bahwa persoalan ini berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum, baik secara perdata maupun pidana, apabila ditemukan pelanggaran dalam proses pengembangannya. Namun demikian, ia menegaskan bahwa hal tersebut tetap perlu dibuktikan melalui mekanisme hukum yang berlaku.

Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo, Rizza Ali Faizin, menegaskan agar pihak pengembang segera menyelesaikan kewajibannya kepada konsumen. Ia juga menyangkan ketidakhadiran pimpinan perusahaan dalam forum tersebut.

“Kami meminta pengembang segera memenuhi kewajibannya kepada warga. Selain itu, untuk sementara waktu kami minta aktivitas pemasaran dihentikan sampai seluruh perizinan dan administrasi diselesaikan,” tegasnya.

Menurutnya, penjualan unit perumahan seharusnya dilakukan setelah seluruh aspek legalitas terpenuhi. DPRD juga berencana melakukan peninjauan langsung ke lokasi guna memastikan kondisi di lapangan.

“Kami akan terus memantau perkembangan kasus ini. Jika tidak ada itikad baik, maka akan dikoordinasikan langkah lanjutan bersama Pemkab Sidoarjo,” tambahnya.

Di akhir hearing, DPRD mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati sebelum membeli rumah atau lahan, dengan memastikan kejelasan status tanah dan perizinan melalui instansi terkait, seperti pemerintah desa, kecamatan, maupun OPD teknis.(dar/nata/red)



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



Cari Berita



Sidoarjo Berangkatkan 2.693 Jamaah Haji, Jember dan Sidoarjo Jadi Kantong Terbesar di Jatim

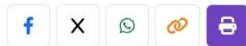
Selasa, 21 April 2026 | 00:26 WIB



Sebanyak 2.693 jamaah haji Sidoarjo siap berangkat 2026. (Din)



Ruang Nurudin



Sidoarjo, Ruang.co.id – PIt. Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah, di Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo, Elliana, menyampaikan sebanyak 2.693 jamaah asal Sidoarjo siap diberangkatkan, proses keberangkatan berlangsung bertahap dalam 11 kloter, mencakup jamaah berbagai usia dan latar belakang, ditujukan kepada keluarga jamaah dan masyarakat luas, di Sidoarjo, pada musim haji 2026.

Persiapan memasuki fase akhir. Seluruh dokumen perjalanan telah terbit. Visa dinyatakan siap. Jamaah dijadwalkan mulai masuk asrama haji dalam waktu dekat, untuk kloter pertama, mulai Ahad nanti. Keberangkatan berlangsung dari kloter awal hingga kloter penutup nomor 116.

Data resmi menunjukkan. Sidoarjo bersama Jember menjadi daerah dengan jumlah jamaah terbesar di Jawa Timur. Peningkatan ini mengikuti tambahan kuota provinsi sekitar 7.200 kursi. Angka tersebut menjadi bagian dari kuota nasional Indonesia sebanyak 221.000 jamaah yang ditetapkan Pemerintah Arab Saudi.

Elliana menyatakan, "Sidoarjo dan Jember menjadi penyumbang jamaah terbesar di Jawa Timur tahun ini." Pernyataan itu merujuk pada data resmi Kemenag yang telah diverifikasi, Senin (20/4/2026).

Di balik angka 2.693. Tersimpan kisah kehidupan yang beragam. Jamaah datang dari latar sosial berbeda. Ada pekerja harian. Ada pedagang kecil. Ada pula lansia yang menunggu puluhan tahun.

Salah satu jamaah berasal dari kelompok bimbingan ibadah haji (KBIH – Kelompok Bimbingan Ibadah Haji) *Jabbal Nur* di Sidoarjo. Tahun ini terdapat seorang pekerja antar air minum isi ulang galon, yang telah berkesempatan berangkat ibadah ke tanah suci. Kesempatan berangkat datang setelah menggantikan porsi istrinya yang tertunda, untuk melunasi pembiayaan ibadah haji reguler.

Data Kemenag mencatat. Proses pendaftaran haji di Indonesia memang menggunakan sistem antrean nasional yang dapat mencapai belasan hingga puluhan tahun, 18 tahun dalam catatan regulasi sekarang.

[Baca Juga Polresta Sidoarjo Bongkar Kasus Pengeroyokan & Pencurian Berantai di Fly Over Masangan](#)

Profil usia jamaah memperlihatkan rentang yang luas untuk keberangkatan ibadah haji di tahun ini. Jamaah tertua adalah Ibu Raminten, 90 tahun, dari Kecamatan Taman. Sedangkan jamaah termuda, Muhammad Nur Al-Magfiroh, 16 tahun, dari Kecamatan Tulangan. Ia berangkat melalui pelimpahan porsi setelah orang tuanya wafat.

Fenomena pelimpahan porsi ini, diatur dalam regulasi resmi. Berdasarkan ketentuan Kemenag, ahli waris dapat melanjutkan porsi haji jamaah yang meninggal dunia, dengan syarat administratif dan verifikasi yang ketat.

Regulasi dan Kesehatan Jadi Penentu

Perubahan aturan, menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan haji 2026. Batas usia pendaftaran kini minimal 12 tahun. Usia keberangkatan minimal 13 tahun.

Untuk jamaah yang ingin berhaji kembali. Masa tunggu diperpanjang menjadi 18 tahun. Sebelumnya hanya 10 tahun. Kebijakan ini bertujuan memberi kesempatan lebih luas kepada calon jamaah baru.

Regulasi tersebut mengacu pada kebijakan nasional Kemenag RI. Penyesuaian dilakukan untuk menjaga keadilan distribusi kuota. Sekaligus mengurangi penumpukan antrean.



Di sisi lain, faktor kesehatan tetap menjadi syarat utama. Tahun ini, tiga jamaah Sidoarjo menunda keberangkatan.



Durasinya Gila! Aku Dibikin Suami Kalah 10x Karena Thormax

ThorMax



Siapa yang Menderita Diabetes Baca Segera sebelum Dihapus

Diaclose



Diabetes Bukan Dari Makanan Manis! Temui Musuh Utama

Diaclose



8 Model Ini Berhasil Abaikan Kritik atas Badan Seksi Mereka

Herbeauty

Satu jamaah mengalami kecelakaan lalu lintas dan harus menjalani operasi. Satu jamaah mengalami luka bakar 30 persen, dan membutuhkan tindakan cangkok kulit. Satu jamaah lainnya terdiagnosa TBC (*tuberculosis*), penyakit infeksi paru yang memerlukan terapi jangka panjang.

Penundaan ini mengikuti prinsip istitha'ah kesehatan. Istitha'ah berarti kemampuan fisik dan mental untuk menjalankan ibadah haji. Ketentuan ini menjadi bagian dari regulasi resmi pemerintah. Elliana menjelaskan, "Kesehatan menjadi prioritas utama. Jamaah harus memenuhi syarat istitha'ah sebelum diberangkatkan."

Sistem Layanan Baru di Arab Saudi

Tahun ini, pemerintah memperkenalkan sistem *Nusuk Nasar*. *Nusuk* merupakan *platform* layanan haji berbasis *digital*. Sistem ini digunakan untuk pengelolaan layanan jamaah di Arab Saudi.

[Baca Juga Fenny Sekda Sidoarjo ke Korsel Dipertanyakan, Bupati Subandi Pilih Bungkam dan DPRD Soroti Transparansinya](#)

Jumlah perusahaan layanan atau *syarikah* (perusahaan penyedia layanan haji) dikurangi. Dari delapan menjadi dua. Tujuannya meningkatkan efisiensi pelayanan. Perubahan ini difokuskan pada layanan katering dan transportasi. Terutama di wilayah Mina, lokasi penting dalam rangkaian ibadah haji.

Kemenag memastikan. Seluruh jamaah Sidoarjo telah terdata dalam sistem tersebut. Dokumen perjalanan, termasuk visa, telah terbit 100 persen.

Perjalanan ini bukan semata perpindahan tempat. Ia menjadi potret harapan. Dari pekerja sederhana hingga lansia. Dari antrian panjang hingga kesempatan yang datang tiba-tiba.

Data, regulasi, dan sistem telah disiapkan. Namun di balik itu. Tersimpan cerita manusia. Tentang kesabaran. Tentang penantian ibadah di tanah suci *Makkah*, tentang keyakinan yang dijaga bertahun-tahun.



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Republik News



Republik TV Oase Iman Akhbar Mom Female Kesehatan Info Otomotif Internasional Teknologi

Sidoarjo Raih Penghargaan Kabupaten Terfavorit di Jaga Desa Award 2026

Redaksi 20 April 2026 2 Min Baca



Foto : Bupati Sidoarjo, H. Subandi mewakili Pemkab Sidoarjo menerima penghargaan Kabupaten Terfavorit di Jaga Desa Award 2026.

Republiknews.com, SIDOARJO – Pemerintah Kabupaten Sidoarjo kembali menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih penghargaan sebagai Kabupaten Terfavorit dalam ajang Jaga Desa Award 2026. Penghargaan tersebut diserahkan dalam malam apresiasi yang digelar di Hotel Fairmont Jakarta pada Minggu (19/4/2026).

Penghargaan ini diberikan berdasarkan penilaian atas karya film pendek bertema "Jaga Desa" yang disubmit oleh Kabupaten Sidoarjo. Film tersebut menampilkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan desa, memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang baik, serta memastikan pengelolaan anggaran desa dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Ajang ini merupakan bagian dari program yang digagas oleh Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional bersama Kejaksaan Republik Indonesia melalui Program Jaksa Garda Desa. Program tersebut bertujuan memberikan pendampingan hukum, pengawasan, serta edukasi kepada pemerintah desa guna mencegah penyimpangan dalam penggunaan dana desa.

Selain itu, program ini juga berperan penting dalam meningkatkan pemahaman hukum aparatur desa, khususnya dalam tata kelola administrasi dan keuangan, sehingga pembangunan desa dapat berjalan tepat sasaran dan sesuai regulasi.

Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, kepada Bupati Sidoarjo, Subandi, yang hadir bersama Kepala Kejaksaan Negeri Sidoarjo, Zaidar Rasepta.

Dalam keterangannya, Subandi menyampaikan rasa syukur dan apresiasi kepada seluruh masyarakat serta perangkat desa di Sidoarjo atas dukungan dan kerja sama yang telah terjalin selama ini. Ia menegaskan bahwa capaian tersebut merupakan hasil kerja kolektif antara pemerintah daerah, pemerintah desa, aparat penegak hukum, dan masyarakat.

"Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, serta meningkatkan pelayanan publik bagi masyarakat," ujar Subandi.

Lebih lanjut, ia menegaskan komitmennya untuk terus mendorong pembangunan desa yang berkelanjutan, termasuk peningkatan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat desa.

Jaga Desa Award 2026 diharapkan menjadi pemicu bagi seluruh daerah di Indonesia untuk terus memperkuat sistem pengawasan dan tata kelola desa, sehingga dana desa dapat dimanfaatkan secara optimal dan tepat sasaran demi kemajuan masyarakat.

Dengan capaian ini, Kabupaten Sidoarjo semakin mempertegas posisinya sebagai daerah yang konsisten dalam mewujudkan pemerintahan desa yang bersih, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik.

(AHF/Kominfo Sidoarjo)



Wabup Sidoarjo Temukan Pavingisasi Saat Sidak Jalan Rusak di Bohar Taman, Dorong Perbaikan Secepatnya Pakai Aspal

Republikjatim.Com
Senin, 20 Apr 2026 19:53 WIB



Sidoarjo (republikjatim.com) - Wakil Bupati (Wabup) Sidoarjo, Mimik Idayana melakukan inspeksi mendadak (Sidak) terhadap kondisi jalan rusak di Desa Bohar, Kecamatan Taman, Sidoarjo, Senin (20/04/2026). Sidak itu, dilakukan bersama Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (PUBM dan SDA) Pemkab Sidoarjo.

Sidak itu, dilakukan sebagai bentuk respons cepat Pemkab Sidoarjo terhadap keluhan masyarakat terkait kerusakan jalan yang dinilai semakin parah. Selain itu, ruas jalan itu diketahui menjadi akses penting bagi warga dan jalur alternatif bagi kendaraan.



Selasa, 21 Apr 2026 21:10 WIB

The Creative Expedition Behind the Series, Siswa SMP AI Muslim Eksplorasi Produksi Animasi dan Dubbing di Mocca Studio



Dalam sidak itu, Mimik Idayana menemukan kondisi jalan mengalami kerusakan cukup serius di beberapa titik. Bahkan, sebagian ruas terlihat sudah beraspal. Namun pada bagian lainnya masih menggunakan paving yang kondisinya rusak dan tidak rata.

"Penggunaan paving pada jalan itu, sudah tidak sesuai lagi dengan intensitas lalu lintas yang ada. Karena jalan itu, kini sering dilalui berbagai macam kendaraan," ujar Mimik Idayana di lokasi sidak.





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

s SDN 1 Sidokepong Ambruk dan Kekurangan Ruang, Bupati Sidoarjo Sarankan Pakai Dana BTT dan Bangun Lantai 2 ■ Siapkan Dana Rp 40,6 Miliar, Pemerint



Selain itu, Mimik mendapati kondisi jalan memang parah. Bahkan, beberapa meter mengalami kerusakan sementara di sisi lain sudah diaspal. Mimik menegaskan jalan itu merupakan jalan kabupaten dan menjadi jalur alternatif. Sehingga sudah tidak layak lagi menggunakan paving.



Selasa, 21 Apr 2026 18:36 WIB

150 ASN Tenaga Admin dan 50 UMKM Digembleng Digitalisasi Saat Sidoarjo Tuan Rumah Garuda AI Impact Summit 2026

"Solusi yang tepat untuk perbaikan jalan ini adalah dengan pengaspalan. Agar konstruksi jalan tetap menyatu dengan ruas lain yang sudah terlebih dahulu diaspal," ungkapnya.



Mimik menambahkan ke depan jalan itu, harus diaspal, bukan dibeton. Hal ini, agar menyambung dengan ruas yang sudah ada. Jika memungkinkan bulan ini segera dikerjakan karena kondisinya berbahaya dan dapat menimbulkan kecelakaan hingga jatuh korban.

"Perbaikan jalan itu, akan menggunakan dana APBD dan ditangani Dinas PUBM dan SDA. Kami meminta agar dinas segera menindaklanjuti karena kondisinya sudah sangat parah dan membahayakan pengguna jalan," tegasnya.



Selasa, 21 Apr 2026 15:00 WIB

Gelaran Sidoarjo School Festival ke 5, Siswa SMK Swasta Pamerkan Inovasi dan Kreativitas Peluang Masa Depan Pelajar





Mimik menambahkan ke depan jalan itu, harus diaspal, bukan dibeton. Hal ini, agar menyambung dengan ruas yang sudah ada. Jika memungkinkan bulan ini segera dikerjakan karena kondisinya berbahaya dan dapat menimbulkan kecelakaan hingga jatuh korban.

"Perbaiki jalan itu, akan menggunakan dana APBD dan ditangani Dinas PUBM dan SDA. Kami meminta agar dinas segera menindaklanjuti karena kondisinya sudah sangat parah dan membahayakan pengguna jalan," tegasnya.



Selasa, 21 Apr 2026 15:00 WIB

Gelaran Sidoarjo School Festival ke 5, Siswa SMK Swasta Pamerkan Inovasi dan Kreativitas Peluang Masa Depan Pelajar



Sementara dengan adanya sidak ini, Mimik berharap perbaikan jalan di Desa Bohar dapat segera direalisasikan.

"Perbaiki jalan itu, demi keselamatan dan kenyamanan masyarakat pengguna jalan ini," tandasnya. Ary/Waw

Editor : Redaksi



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



RadarJatim.id



DPRD Sidoarjo Dorong Pembangunan Puskesmas Baru di Setiap Kecamatan

by Radar Jatim — 21 April 2026 in Politik



H. Abdillah Nasih, Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo.



SIDOARJO (RadarJatim.id) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sidoarjo mendorong percepatan pembangunan fasilitas kesehatan, terutama penambahan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) baru di 18 kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Sidoarjo.

Tidak hanya itu saja, DPRD juga meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo untuk melanjutkan pembangunan Rumah Sakit (RS) Sedati yang sempat terhenti pada tahun 2025 lalu.

Ketua DPRD Sidoarjo, H. Abdillah Nasih mengatakan bahwa penambahan Puskesmas baru dan pembangunan RS Sedati untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat, karena rasio jumlah Puskesmas saat ini masih belum ideal jika dibandingkan dengan jumlah penduduk di Kabupaten Sidoarjo yang terus mengalami peningkatan.

“Penambahan fasilitas kesehatan ini menjadi kebutuhan mendesak agar pelayanan bisa lebih merata, terutama di wilayah-wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi,” kata Ketua DPRD Sidoarjo, H. Abdillah Nasih saat ditemui awak media dikantornya, Selasa (21/4/2026).

Pria yang akrab disapa Cak Nasih itu mengungkapkan bahwa DPRD bersama Pemkab Sidoarjo telah menargetkan pembangunan 2 Puskesmas baru pada tahun 2026 ini, dengan harapan dapat memperluas jangkauan layanan kesehatan dasar bagi masyarakat di setiap kecamatan.

Begitu juga dengan pembangunan RS Sedati yang harus dilanjutkan dan diselesaikan pada tahun 2026 ini, termasuk pemenuhan Alat Kesehatan (Alkes) dan kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ditargetkan rampung pada 2027.

“RS Sedati harus menjadi prioritas. Tidak hanya bangunannya, tetapi juga kelengkapan fasilitas dan tenaga kesehatannya agar bisa langsung optimal melayani masyarakat,” ungkapnya.

Namun demikian, DPRD Sidoarjo tetap fleksibel dalam upaya pembangunan Puskesmas baru. Bisa melalui pembangunan Puskesmas baru maupun peningkatan status dari Puskesmas Pembantu (Pustu) menjadi Puskesmas Induk di setiap kecamatan.

Terkait anggaran, politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu memastikan bahwa pembiayaan untuk pembangunan fisik telah disiapkan pada tahun 2026 ini.

Sedangkan kebutuhan pendukung lainnya akan dilengkapi secara bertahap pada tahun 2027 nanti.

Ia mengakui bahwa masih terdapat tantangan, khususnya dalam proses pembebasan lahan di wilayah Kecamatan Taman.

“Jika kendala tersebut tidak segera terselesaikan, kami menyarankan agar Pemkab (Sidoarjo, red) mencari lokasi alternatif di desa lain, agar program ini tidak tertunda,” pungkasnya. (mams)





News

Jalan Bohar Rusak dan Membahayakan, Wabup Sidoarjo Minta Perbaikan Dikebut Sekarang

Media Sorot Mata 20 April 2026



SIDOARJO, MEDIASOROTMATA.COM – Wakil Bupati Sidoarjo, Hj. Mimik Idayana, melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap kondisi jalan rusak di Desa Bohar, Kecamatan Taman, pada Senin (20/4/2026), yang dilakukan bersama Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (PUBMSDA) Kabupaten Sidoarjo.

Sidak tersebut dilakukan sebagai bentuk respons cepat Pemerintah Kabupaten Sidoarjo terhadap keluhan masyarakat terkait kerusakan jalan yang dinilai semakin parah, serta ruas jalan tersebut diketahui menjadi akses penting bagi warga dan jalur alternatif bagi kendaraan.

Dalam sidak tersebut, Mimik menemukan bahwa kondisi jalan mengalami kerusakan cukup serius di beberapa titik, dengan sebagian ruas terlihat sudah beraspal, namun pada bagian lainnya masih menggunakan paving yang kondisinya rusak dan tidak rata.

Menurutnya, penggunaan paving pada jalan tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan intensitas lalu lintas yang ada, karena jalan tersebut kini sering dilalui berbagai macam kendaraan.

Mimik menyatakan bahwa ia langsung melakukan sidak dan mendapati kondisi jalan memang parah, dengan beberapa meter mengalami kerusakan sementara di sisi lain sudah diaspal, serta menegaskan bahwa jalan tersebut merupakan jalan kabupaten dan juga menjadi jalur alternatif sehingga sudah tidak layak lagi menggunakan paving.

Ia menegaskan bahwa solusi yang tepat untuk perbaikan jalan tersebut adalah dengan pengaspalan agar konstruksi jalan tetap menyatu dengan ruas lain yang sudah terlebih dahulu diaspal.

Ia menambahkan bahwa ke depan jalan tersebut harus diaspal, bukan dibeton, agar menyambung dengan ruas yang sudah ada, dan jika memungkinkan bulan ini segera dikerjakan karena kondisinya berbahaya serta dapat menimbulkan korban.

Ia juga menegaskan bahwa perbaikan jalan tersebut akan menggunakan anggaran dari APBD dan ditangani oleh Dinas PU, serta meminta agar pihak PU segera menindaklanjuti karena kondisinya sudah sangat parah dan membahayakan.

Dengan adanya sidak ini, diharapkan perbaikan jalan di Desa Bohar dapat segera direalisasikan demi keselamatan dan kenyamanan masyarakat pengguna jalan. **(NURI)**

Tags: [Jalan Bohar Rusak dan Membahayakan](#)

[Wabup Sidoarjo Minta Perbaikan Dikebut Sekarang](#)

Po





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

EKSKLUSIF.CO.ID

Home Kepolisian TNI DPR MPR Olahraga Pemerintah Kriminal Advetor



Beranda > DPR >

DPR

Biar Tidak Dikatakan Jadi Polemik Perumahan MPS, DPRD Minta Pengembang Untuk Menghentikan Pemasaran dan Segera Urus Perizinan

Meja Redaksi 2 Min Baca April 21, 2026



Sidoarjo eksklusif.co.id – Permasalahan perumahan kembali mencuat di Kabupaten Sidoarjo.

Kali ini, persoalan terjadi di Perumahan Mapan Putra Sentosa (MPS) yang berlokasi di Desa Mojoruntut, Kecamatan Krembung.

Puluhan warga penghuni mengadukan nasib mereka ke DPRD Sidoarjo terkait dugaan belum terpenuhinya hak atas sertifikat rumah.

Menindaklanjuti aduan tersebut, DPRD Sidoarjo menggelar hearing (rapat dengar pendapat) di ruang sidang paripurna, (21/4/2026) Rapat dipimpin Ketua Komisi A Rizza Ali Faizin, didampingi Ketua Komisi B Bambang Pujiyanto dan Ketua Komisi C Choirul Hidayat.

Hadir pula perwakilan warga, pihak pengembang, serta sejumlah pejabat OPD terkait, termasuk Kepala DPMTSP Sidoarjo, Ridho Prasetyo.

Koordinator perwakilan warga, Radi Nugroho, menyampaikan bahwa perumahan tersebut mulai dihuni sejak 2018 dan kini ditempati sekitar 151 kepala keluarga.

Dari jumlah tersebut, sekitar 30 warga mengaku telah melunasi pembayaran sejak 2022, namun hingga kini belum menerima sertifikat hak milik.

“Kami sudah menunggu hampir empat tahun, tetapi sertifikat belum juga diberikan.

Kami berharap DPRD bisa membantu penyelesaiannya,” ujar Radi.

Ia juga menyebutkan bahwa pihak warga telah melaporkan persoalan tersebut ke Polresta Sidoarjo.

Selain itu, warga menyalahkan masih adanya aktivitas pemasaran unit oleh pengembang Di tengah belum tuntasnya kewajiban kepada pembeli sebelumnya.

Dalam hearing tersebut juga terungkap bahwa perizinan perumahan diduga belum lengkap.

Berdasarkan penjelasan yang disampaikan dalam forum, lahan yang digunakan disebut berasal dari status gogol gilir Yang belum seluruhnya dialihkan secara administratif sesuai ketentuan yang berlaku.

Anggota Komisi B DPRD Sidoarjo, Supriyono, menyampaikan bahwa persoalan ini berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum, Baik secara perdata maupun pidana, apabila ditemukan pelanggaran dalam proses pengembangannya.



Kali ini, persoalan terjadi di Perumahan Mapan Putra Sentosa (MPS) yang berlokasi di Desa Mojaruntut, Kecamatan Krembung.

Puluhan warga penghuni mengadukan nasib mereka ke DPRD Sidoarjo terkait dugaan belum terpenuhinya hak atas sertifikat rumah.

Menindaklanjuti aduan tersebut, DPRD Sidoarjo menggelar hearing (rapat dengar pendapat) di ruang sidang paripurna, (21/4/2026) Rapat dipimpin Ketua Komisi A Rizza Ali Faizin, didampingi Ketua Komisi B Bambang Pujianto dan Ketua Komisi C Choirul Hidayat.

Hadir pula perwakilan warga, pihak pengembang, serta sejumlah pejabat OPD terkait, termasuk Kepala DPMPSTP Sidoarjo, Ridho Prasetyo.

Koordinator perwakilan warga, Radi Nugroho, menyampaikan bahwa perumahan tersebut mulai dihuni sejak 2018 dan kini ditempati sekitar 151 kepala keluarga.

Dari jumlah tersebut, sekitar 30 warga mengaku telah melunasi pembayaran sejak 2022, namun hingga kini belum menerima sertifikat hak milik.

"Kami sudah menunggu hampir empat tahun, tetapi sertifikat belum juga diberikan.

Kami berharap DPRD bisa membantu penyelesaiannya," ujar Radi.

Ia juga menyebutkan bahwa pihak warga telah melaporkan persoalan tersebut ke Polresta Sidoarjo.

Selain itu, warga menyayangkan masih adanya aktivitas pemasaran unit oleh pengembang Di tengah belum tuntasnya kewajiban kepada pembeli sebelumnya.

Dalam hearing tersebut juga terungkap bahwa perizinan perumahan diduga belum lengkap.

Berdasarkan penjelasan yang disampaikan dalam forum, lahan yang digunakan disebut berasal dari status gogol gilir Yang belum seluruhnya dialihkan secara administratif sesuai ketentuan yang berlaku.

Anggota Komisi B DPRD Sidoarjo, Supriyono, menyampaikan bahwa persoalan ini berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum, Baik secara perdata maupun pidana, apabila ditemukan pelanggaran dalam proses pengembangannya.

Namun demikian, ia menegaskan bahwa hal tersebut tetap perlu dibuktikan melalui mekanisme hukum yang berlaku.

Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo, Rizza Ali Faizin, menegaskan agar pihak pengembang segera menyelesaikan kewajibannya kepada konsumen.

Ia juga menyayangkan ketidakhadiran pimpinan perusahaan dalam forum tersebut.

"Kami meminta pengembang segera memenuhi kewajibannya kepada warga.

Selain itu, untuk sementara waktu kami minta aktivitas pemasaran dihentikan sampai seluruh perizinan dan administrasi diselesaikan," tegasnya.

Menurutnya, penjualan unit perumahan seharusnya dilakukan setelah seluruh aspek legalitas terpenuhi.

DPRD juga berencana melakukan peninjauan langsung ke lokasi guna memastikan kondisi di lapangan.

"Kami akan terus memantau perkembangan kasus ini.

Jika tidak ada itikad baik, maka akan dikoordinasikan langkah lanjutan bersama Pemkab Sidoarjo," tambahnya.

Di akhir hearing, DPRD mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati sebelum membeli rumah atau lahan, Dengan memastikan kejelasan status tanah dan perizinan melalui instansi terkait, seperti pemerintah desa, kecamatan, maupun OPD teknis."Tegasnya. (Ali)

 1348 kali dilihat , 1068 kali dilihat hari ini

Tag: [# MPS](#) [# Perumahan](#) [# Polemik](#)





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Scroll Untuk Baca Berita X

ANN ARJUNA
NUSANTARA NEWS.COM


news Berita Daerah Nusantara Pemerintahan Pembangunan Pendidikan Kesehatan

Beranda > Pemerintahan >

Pemerintahan

Kabupaten Sidoarjo Tuan Rumah Garuda AI Impact Summit 2026

Redaksi 3 Min Baca
21 April 2026



Sidoarjo, Arjunanusantaranews.com, – Kabupaten Sidoarjo terpilih sebagai tuan rumah Garuda AI Impact Summit 2026 Regional Sidoarjo. Kegiatan tersebut merupakan kolaborasi antara Garuda AI, Binar, Microsoft, dan Kementerian Komdigi dengan Pemkab Sidoarjo. 150 ASN admin medsos OPD Sidoarjo serta 50 pelaku UMKM diundang menjadi pesertanya.

Acara yang berlangsung di Pendopo Delta Wibawa Sidoarjo pagi tadi, Selasa, (21/4/2026) dibuka Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Sidoarjo Ainun Amalia. Empat narasumber dihadirkan dalam Garuda AI Impact Summit 2026 Regional Sidoarjo.

Antara lain Dita Aisyah yang menjabat sebagai Direktur Binar, Abdul Mughits dari pegiat UMKM dan AI Jawa Timur serta Yuliar M Zega Widyaiswara Kementerian Komunikasi dan Digital RI serta Sinar Hadi Wijaya yang merupakan CEO Dapoer Digital Kreatif.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Sidoarjo Ainun Amalia mengatakan Garuda AI Impact Summit 2026 menjadi langkah strategis dalam akselerasi teknologi daerah. Disampaikannya Artificial Intelligence (AI) saat ini bukan lagi sekadar tren teknologi. Melainkan instrumen vital untuk memperkuat daya saing daerah dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

“Hari ini, Sidoarjo tidak hanya menjadi saksi, tetapi menjadi kontributor utama dalam agenda strategis nasional melalui Garuda AI Impact Summit 2026,” ucapnya.

Ainun Amalia mengatakan implementasi pemerintah digital di Sidoarjo bukan sekadar wacana. Kabupaten Sidoarjo telah membangun fondasi ekosistem digital yang kokoh dan inklusif. Hal tersebut menjadi bentuk komitmen nyata transformasi daerah yang dilakukan Kabupaten Sidoarjo.

“Kehadiran AI harus kita pandang sebagai “pengungkit” yang akan memperkuat tiga pilar utama pembangunan kita,” ujarnya.

Tiga pilar utama pembangunan tersebut ungkap Ainun Amalia yakni akselerasi tata kelola pemerintahan (smart governance), transformasi komunikasi publik yang responsive serta inklusivitas ekonomi digital bagi UMKM. Disampaikannya bahwa integrasi AI dalam sistem pemerintahan daerah ditujukan untuk menyederhanakan birokrasi dan mempercepat proses pengambilan keputusan berbasis data (data-driven policy). “Kita ingin menciptakan birokrasi yang lebih ramping namun lebih cerdas dalam melayani,” ucapnya.

Ainun Amalia juga menyampaikan Kabupaten Sidoarjo terus mewujudkan transformasi komunikasi publik yang responsive. Seluruh ASN di Sidoarjo harus mampu menjadi garda terdepan dalam diseminasi informasi yang cepat, akurat, dan adaptif. “AI hadir sebagai mitra strategis untuk mendeteksi isu secara dini dan menyusun narasi publik yang lebih tepat sasaran,” ungkapnya.



Sidoarjo, Arjunanusantaranews.com, – Kabupaten Sidoarjo terpilih sebagai tuan rumah Garuda AI Impact Summit 2026 Regional Sidoarjo. Kegiatan tersebut merupakan kolaborasi antara Garuda AI, Binar, Microsoft, dan Kementerian Komdigi dengan Pemkab Sidoarjo. 150 ASN admin medsos OPD Sidoarjo serta 50 pelaku UMKM diundang menjadi pesertanya.

Acara yang berlangsung di Pendopo Delta Wibawa Sidoarjo pagi tadi, Selasa, (21/4/2026) dibuka Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Sidoarjo Ainun Amalia. Empat narasumber dihadirkan dalam Garuda AI Impact Summit 2026 Regional Sidoarjo.

Antara lain Dita Aisyah yang menjabat sebagai Direktur Binar, Abdul Mughits dari pegiat UMKM dan AI Jawa Timur serta Yuliar M Zega Widyaiswara Kementerian Komunikasi dan Digital RI serta Sinar Hadi Wijaya yang merupakan CEO Dapoer Digital Kreatif.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Sidoarjo Ainun Amalia mengatakan Garuda AI Impact Summit 2026 menjadi langkah strategis dalam akselerasi teknologi daerah. Disampaikannya Artificial Intelligence (AI) saat ini bukan lagi sekadar tren teknologi. Melainkan instrumen vital untuk memperkuat daya saing daerah dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

“Hari ini, Sidoarjo tidak hanya menjadi saksi, tetapi menjadi kontributor utama dalam agenda strategis nasional melalui Garuda AI Impact Summit 2026,” ucapnya.

Ainun Amalia mengatakan implementasi pemerintah digital di Sidoarjo bukan sekadar wacana. Kabupaten Sidoarjo telah membangun fondasi ekosistem digital yang kokoh dan inklusif. Hal tersebut menjadi bentuk komitmen nyata transformasi daerah yang dilakukan Kabupaten Sidoarjo.

“Kehadiran AI harus kita pandang sebagai “pengungkit” yang akan memperkuat tiga pilar utama pembangunan kita,” ujarnya.

Tiga pilar utama pembangunan tersebut ungkap Ainun Amalia yakni akselerasi tata kelola pemerintahan (smart governance), transformasi komunikasi publik yang responsive serta inklusivitas ekonomi digital bagi UMKM. Disampaikannya bahwa integrasi AI dalam sistem pemerintahan daerah ditujukan untuk menyederhanakan birokrasi dan mempercepat proses pengambilan keputusan berbasis data (data-driven policy). “Kita ingin menciptakan birokrasi yang lebih ramping namun lebih cerdas dalam melayani,” ucapnya.

Ainun Amalia juga menyampaikan Kabupaten Sidoarjo terus mewujudkan transformasi komunikasi publik yang responsive. Seluruh ASN di Sidoarjo harus mampu menjadi garda terdepan dalam diseminasi informasi yang cepat, akurat, dan adaptif. “AI hadir sebagai mitra strategis untuk mendeteksi isu secara dini dan menyusun narasi publik yang lebih tepat sasaran,” ungkapnya.

Selain itu lanjut Ainun Amalia Kabupaten Sidoarjo akan memastikan inklusivitas ekonomi digital bagi para pelaku UMKM Sidoarjo. Pemkab Sidoarjo akan memastikan bahwa kecanggihan teknologi tidak hanya dinikmati oleh korporasi besar. Tetapi juga menjadi alat produksi bagi UMKM Sidoarjo untuk naik kelas dan bersaing di pasar global.

“Ini adalah peluang emas bagi 150 ASN dan 50 pelaku UMKM terpilih untuk mendapatkan keterampilan aplikatif yang nyata melalui sesi penyampaian materi dan diskusi nanti. Jadikan forum kolaboratif lintas sektor ini sebagai ruang untuk belajar, berinovasi, dan menciptakan dampak nyata bagi kemajuan Kabupaten Sidoarjo,” pungkasnya.

Sementara itu Kepala Dinas Kominfo Sidoarjo Eri Sudewo mengatakan penyelenggaraan Regional AI Summit kali ini memiliki beberapa sasaran utama. Salah satunya untuk menghasilkan Peta Jalan Komitmen AI Lokal (Local AI Commitment Roadmap). Peta Jalan tersebut akan disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi daerah Kabupaten Sidoarjo.

“Hasil dari peta jalan lokal ini akan dikonsolidasikan ke dalam Buku Kebijakan AI (AI Policy White Paper) yang akan diluncurkan pada puncak acara National AI Summit mendatang,” ucapnya.

Kabupaten Sidoarjo sebagai tuan rumah Garuda AI Impact Summit 2026. Ia juga berharap penyelenggaraan Garuda AI Impact Summit 2026 Regional Sidoarjo dengan tema “AI For Digital Economic” akan membangun fondasi ekosistem digital yang inklusif untuk memperkuat tata kelola pemerintahan dan ekonomi digital bagi UMKM.

Post Views: 13



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



CAKRAWALA.CO
Nusantara Lebih Dekat

Rabu, 22 April 2026



Katalog Buku Daerah Edukasi Nasional Peristiwa Haji Kita Kesehatan Kuliner Ling

Jatim

Entas Kemiskinan DPRD Sidoarjo Dorong Proyek di Biayai APBD Wajib Libatkan Tenaga Kerja Lokal dari Keluarga Miskin



Iswin Arrizal, Cakrawala - Rabu, 22 April 2026 | 05:55 WIB



Unsur Pimpinan DPRD Sidoarjo (Foto : ist)

Sidoarjo, cakrawala.co – Upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo terus didorong agar tidak hanya bergantung pada bantuan sosial, tetapi juga membuka akses pendapatan langsung bagi masyarakat miskin. Kalangan legislatif menilai, proyek-proyek yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus menjadi instrumen strategis untuk menyerap tenaga kerja lokal, khususnya dari keluarga miskin.

Wakil Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo, Bangun Winarso, mengungkapkan bahwa angka kemiskinan di Sidoarjo menunjukkan tren penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Saat pandemi Covid-19, angka kemiskinan sempat menyentuh 6,12 persen. Namun, saat ini telah turun menjadi sekitar 4,4 persen.

“Target pemerintah daerah sebenarnya 4,5 persen, dan itu sudah tercapai. Tapi kita tetap harus mengawal agar penurunannya benar-benar berdampak nyata dan merata di masyarakat,” ujarnya.

recommended by maid



Menurutnya, angka 4,4 persen tersebut setara dengan sekitar 135 ribu jiwa. Pemerintah daerah pun menargetkan penurunan kembali hingga kisaran 4,25 persen pada tahun 2026.

Salah satu program yang dinilai berkontribusi dalam menekan angka kemiskinan adalah perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Bangun menyebut, program ini menyasar langsung masyarakat miskin yang hidup dalam kondisi hunian tidak layak.

“Setiap tahun saya pribadi menganggarkan Pokir sekitar Rp1 miliar untuk RTLH. Ditambah program dari Baznas yang bisa merehabilitasi 230 sampai 240 rumah per tahun,” jelasnya.



Wakil Ketua komisi D, Bangun Winarso (Foto : Win)

Program RTLH dari pemerintah daerah rata-rata mengalokasikan Rp30 juta per rumah, sementara dari Baznas maksimal sekitar Rp25 juta. Meski demikian, Bangun Winarso mengingatkan bahwa program ini tidak serta-merta mengangkat penerima dari garis kemiskinan.

“Rumahnya sudah bagus, tapi penghasilannya masih di kisaran Rp650 ribu sampai Rp750 ribu per bulan. Kalau tidak didampingi program lain seperti PKH, BPNT, atau jaminan kesehatan, mereka bisa jatuh miskin lagi,” tegasnya.

Ia menekankan pentingnya validitas data agar bantuan tepat sasaran. “Data harus benar-benar diverifikasi di lapangan, jangan sampai yang menerima justru bukan yang berhak,” tambahnya.

Lebih jauh, Bangun mendorong adanya kebijakan yang mewajibkan kontraktor proyek APBD untuk melibatkan tenaga kerja lokal, khususnya dari kelompok masyarakat miskin.

“Kalau saya jadi pemda, proyek APBD itu wajib menyerap tenaga kerja lokal dari desil 1 sampai 4. Misalnya 25 persen untuk tenaga kasar seperti kuli atau pembantu tukang,” katanya.

Menurutnya, skema ini efektif karena memberikan penghasilan langsung kepada masyarakat yang belum bekerja. Ia mencontohkan, kontraktor dapat berkoordinasi dengan Dinas Sosial dan Dinas Tenaga Kerja untuk merekrut tenaga kerja dari basis data masyarakat miskin.



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

[Katalog Buku](#) [Daerah](#) [Edukasi](#) [Nasional](#) [Peristiwa](#) [Haji Kita](#)

"Jadi ketika ada kebutuhan tenaga kerja, tinggal disampaikan. Nanti dinas yang menyalurkan sesuai data. Ini akan lebih cepat menurunkan kemiskinan dibanding hanya mengandalkan bantuan," ujarnya.

Meski demikian, ia mengakui kebijakan tersebut belum berjalan maksimal. Selama ini baru sebatas imbauan atau surat edaran, belum menjadi aturan yang mengikat.

"Kalau ingin efektif, harus dimasukkan dalam syarat tender. Jadi kontraktor wajib mengakomodir tenaga kerja lokal," tegasnya.

Bangun bahkan menilai perlu langkah "ekstrem" dalam arti terobosan kebijakan agar penurunan kemiskinan bisa lebih cepat.

recommended by mgid >



DIACLOSE

Diabetes Bukan Dari Makanan Manis! Temui Musuh Utama

PELAJARI LEBIH >

"Kalau hanya mengandalkan bantuan, penurunannya lambat. Harus ada intervensi yang memberikan penghasilan langsung," ujarnya.



istAnggota Komisi D DPRD Sidoarjo, H. Tarkit Erdianto, SH, MH (Goto: ist)

Senada dengan itu, anggota Komisi D DPRD Sidoarjo dari Fraksi PDI Perjuangan, **Tarkit Erdianto**, menilai bahwa kunci utama keberhasilan kebijakan tersebut adalah regulasi yang jelas.

"Pemerintah daerah harus membuat aturan. Kalau tidak diatur, ya tidak ada kewajiban bagi rekanan untuk memberdayakan tenaga kerja lokal," tegasnya.

Ia menegaskan, tanpa regulasi, upaya pengentasan kemiskinan hanya akan menjadi slogan.

"Jangan hanya bicara pengentasan kemiskinan, tapi tenaga kerja lokal tidak dilibatkan. Itu tidak akan efektif," katanya.

Tarkit juga menyebut bahwa program RTLH memang penting, namun tidak memiliki dampak langsung terhadap peningkatan pendapatan masyarakat.

"RTLH itu lebih ke perbaikan hunian. Yang berdampak langsung ke ekonomi adalah ketika pekerja lokal dilibatkan dalam pembangunan itu," jelasnya.

Perlu Integrasi Program dan Keberpihakan APBD

Legislator sepakat bahwa pengentasan kemiskinan membutuhkan pendekatan terpadu, mulai dari validasi data, bantuan sosial, hingga penciptaan lapangan kerja. Tarkit berharap agar APBD benar-benar difokuskan untuk kepentingan masyarakat kecil.

"Kami berharap APBD menyasar rakyat kecil, termasuk RTLH dan pemberdayaan tenaga kerja lokal," katanya.



Unsur Pimpinan DPRD Sidoarjo (Foto : ist)



Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo, H. Dhamroni Chudlori (Foto : ist)

Dengan adanya dorongan dari legislatif, diharapkan pemerintah daerah segera merumuskan regulasi yang mengikat agar proyek-proyek pembangunan tidak hanya menghasilkan infrastruktur, tetapi juga menjadi alat efektif untuk mengentaskan kemiskinan di Sidoarjo.

Sementara Ketua Komisi D, H. **Dhamroni Chudlori** juga menyampaikan dukungannya terhadap upaya pemberdayaan masyarakat melalui program tersebut. Menurutnya di tengah kondisi perekonomian yang belum stabil dan meningkatnya angka pemutusan hubungan kerja (PHK), program proyek padat karya dinilai menjadi salah satu solusi efektif dalam menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat.

Menurutnya, situasi saat ini menuntut adanya langkah konkret dari pemerintah untuk membuka peluang kerja. "Apalagi kondisi perekonomian seperti sekarang, PHK juga ada di mana-mana dan lapangan kerja sulit. Maka program proyek padat karya ini menjadi salah satu solusi untuk menciptakan lapangan kerja baru," tambahnya.



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Program ini disebut sejalan dengan visi kepala daerah dalam menciptakan lapangan usaha baru, sekaligus melibatkan masyarakat secara langsung dalam pembangunan di daerah.

"Ini sejalan dengan visi Pak Bupati, yaitu penciptaan lapangan kerja. Kita mendukung pelibatan masyarakat dalam pembangunan di daerah," tambahnya.

Selain itu, konsep pembangunan yang mengedepankan keseimbangan desa dan kota juga menjadi landasan penting. Pembangunan infrastruktur di desa dinilai perlu diprioritaskan sebagai bagian dari upaya tersebut.

"Noto deso, bangun kuto itu kan berarti infrastruktur desa harus dipenuhi dulu. Saya sepakat kalau itu dijalankan," jelasnya.

Meski demikian, usulan terkait pelaksanaan program ini diakui belum secara resmi dilaporkan kepada pemerintah daerah. Namun secara prinsip, pihaknya menyatakan setuju dengan konsep yang ditawarkan.

"Secara umum, kita setuju dengan konsep proyek padat karya ini," katanya.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa masyarakat saat ini sangat membutuhkan pekerjaan. Oleh karena itu, proyek padat karya dengan pelibatan masyarakat dinilai sangat relevan.

"Masyarakat sekarang butuh pekerjaan. Jadi pelibatan masyarakat dalam proyek-proyek padat karya itu sangat penting," tegasnya.

Terkait regulasi, disebutkan bahwa saat ini sudah ada aturan mengenai perlindungan tenaga kerja. Namun, kebijakan khusus untuk penciptaan lapangan usaha masih mengacu pada program kepala daerah.

"Kalau Perda perlindungan tenaga kerja sudah ada, tapi untuk penciptaan lapangan usaha ini masih mengikuti program Pak Bupati," ungkapinya.

Ia juga menyinggung target penciptaan 100 ribu lapangan usaha baru, di mana proyek padat karya dapat berkontribusi signifikan dalam mencapainya.

Jatim

Entas Kemiskinan DPRD Sidoarjo Dorong Proyek di Biayai APBD Wajib Libatkan Tenaga Kerja Lokal dari Keluarga Miskin



Iswin Arrizal, Cakrawala - Rabu, 22 April 2026 | 05:55 WIB



Unsur Pimpinan DPRD Sidoarjo (Foto : ist)

“Padat karya ini bisa menyumbang pada target 100 ribu lapangan usaha baru, terutama bagi mereka yang belum bekerja atau terkena PHK,” jelasnya.

Program ini diyakini tidak hanya mampu mengurangi pengangguran, tetapi juga menekan angka kemiskinan jika dijalankan secara masif.

Meski demikian, ia menegaskan pentingnya menjaga kualitas pekerjaan dalam pelaksanaan proyek. Pelibatan tenaga profesional tetap diperlukan, khususnya dalam pembangunan infrastruktur.

“Tetap harus melibatkan tenaga ahli agar kualitas dan spesifikasi pekerjaan terjaga, tidak bisa asal-asalan,” pungkasnya.



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



RadarJatim.id



DPRD Sidoarjo Dorong Pembangunan Puskesmas Baru di Setiap Kecamatan

by Radar Jatim — 21 April 2026 in Politik



H. Abdillah Nasih, Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo.



SIDOARJO (RadarJatim.id) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sidoarjo mendorong percepatan pembangunan fasilitas kesehatan, terutama penambahan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) baru di 18 kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Sidoarjo.

Tidak hanya itu saja, DPRD juga meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo untuk melanjutkan pembangunan Rumah Sakit (RS) Sedati yang sempat terhenti pada tahun 2025 lalu.

Ketua DPRD Sidoarjo, H. Abdillah Nasih mengatakan bahwa penambahan Puskesmas baru dan pembangunan RS Sedati untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat, karena rasio jumlah Puskesmas saat ini masih belum ideal jika dibandingkan dengan jumlah penduduk di Kabupaten Sidoarjo yang terus mengalami peningkatan.

“Penambahan fasilitas kesehatan ini menjadi kebutuhan mendesak agar pelayanan bisa lebih merata, terutama di wilayah-wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi,” kata Ketua DPRD Sidoarjo, H. Abdillah Nasih saat ditemui awak media dikantornya, Selasa (21/4/2026).

Pria yang akrab disapa Cak Nasih itu mengungkapkan bahwa DPRD bersama Pemkab Sidoarjo telah menargetkan pembangunan 2 Puskesmas baru pada tahun 2026 ini, dengan harapan dapat memperluas jangkauan layanan kesehatan dasar bagi masyarakat di setiap kecamatan.

Begitu juga dengan pembangunan RS Sedati yang harus dilanjutkan dan diselesaikan pada tahun 2026 ini, termasuk pemenuhan Alat Kesehatan (Alkes) dan kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ditargetkan rampung pada 2027.

“RS Sedati harus menjadi prioritas. Tidak hanya bangunannya, tetapi juga kelengkapan fasilitas dan tenaga kesehatannya agar bisa langsung optimal melayani masyarakat,” ungkapnya.

Namun demikian, DPRD Sidoarjo tetap fleksibel dalam upaya pembangunan Puskesmas baru. Bisa melalui pembangunan Puskesmas baru maupun peningkatan status dari Puskesmas Pembantu (Pustu) menjadi Puskesmas Induk di setiap kecamatan.

Terkait anggaran, politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu memastikan bahwa pembiayaan untuk pembangunan fisik telah disiapkan pada tahun 2026 ini.

Sedangkan kebutuhan pendukung lainnya akan dilengkapi secara bertahap pada tahun 2027 nanti.

Ia mengakui bahwa masih terdapat tantangan, khususnya dalam proses pembebasan lahan di wilayah Kecamatan Taman.

“Jika kendala tersebut tidak segera terselesaikan, kami menyarankan agar Pemkab (Sidoarjo, red) mencari lokasi alternatif di desa lain, agar program ini tidak tertunda,” pungkasnya. (mams)

